

Pengaruh Korupsi Terhadap Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Vol 9 Issue 1
(Januari - Juli, 2025)

Octaviani Setioningsih¹, Muhammad Jamal²,

¹² Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Mulawarman
Email: Setioningsih3010@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: xxx
Revised version received: xxx
Accepted: xxx
Available online: xxx

Keywords:

Corruption, Public Trust, Government

How to Cite:

APA Style 7th

ABSTRACT

This research aims to analyze the impact of corruption on public trust in the government of Kutai Kartanegara and to determine the extent of this impact. The research employs a quantitative approach, with the population consisting of residents of Kutai Kartanegara. A probability sampling method using cluster random sampling was applied, resulting in a sample size of 100 respondents. Primary data was collected through a questionnaire distributed via Google Forms. Data analysis was performed using simple regression analysis with IBM SPSS Statistics version 22 for Windows. The results indicate that corruption affects public trust in the Kutai Kartanegara government, evidenced by a coefficient of determination value of 31%, meaning that corruption accounts for 31% of the variance in public trust. This suggests that elements such as abuse of power, misuse of public funds, betrayal of trust, and personal gain collectively impact the integrity, competence, consistency, loyalty, and transparency of the Kutai Kartanegara government. Consequently, the higher the level of corruption within the Kutai Kartanegara government, the lower the public trust in the government.

Available online at <https://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/IJGCS>
Copyright (c) 2023 by IJGCS



1. Pembahasan

Indonesia adalah negara kaya akan keberagaman dan potensi sumber daya yang menghadapi tantangan serius dalam hal penanganan korupsi. Pasalnya dimata dunia, Indonesia mengalami penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang signifikan. Hal tersebut dibuktikan berdasar survei yang dilakukan oleh Transparency International pada tahun 2022 yang menempatkan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia dari awalnya pada skala 38 menjadi 34 dari 100 dan berdasarkan pemeringkatan negara di dunia, Indonesia menempati posisi ke-110 dari 180 negara, yang menandakan Indonesia memiliki indeks korupsi lebih buruk dari rata-rata negara lainnya di dunia.

Korupsi yang terkait dengan institusi dan pejabat pemerintah akan menghasilkan sistem pemerintahan yang semakin jauh dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance). Korupsi tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi juga merupakan faktor politik yang berdampak signifikan pada penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Evi Maria, 2021). Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terbentuk ketika tindakan pemerintah dan pejabatnya sesuai dengan harapan dan aspirasi yang mereka miliki (Dwiyanto, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat dipengaruhi oleh kinerja dan integritas pemerintah, yang pada gilirannya mempengaruhi stabilitas sosial dan partisipasi politik masyarakat. Namun, ketika terjadi tindakan korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah, kepercayaan masyarakat dapat mengalami penurunan signifikan.

Syed Husein Alatas (1987) mendefinisikan korupsi sebagai “abuse of trust in the interest of private gain” yang dimaknai sebagai korupsi adalah suatu bentuk pengkhianatan kepercayaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, pemerintahan yang korup akan cenderung menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan berbagai penelitian empiris yang menunjukkan bahwa korupsi yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan berpengaruh negatif terhadap kepercayaan masyarakat pada pemerintah (Muhammad Syihabuddin, 2020; Sean Richey, 2009).

Dewasa ini, korupsi di Indonesia dianggap sebagai patologi sosial yang serius dan mengancam berbagai lini kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara (Kalalinggi, 2020). Pasalnya korupsi di Indonesia terus mengalami peningkatan, tidak hanya dilakukan pada instansi dan lembaga-lembaga pusat saja namun sudah merambat pada daerah. Pada tahun 2019, Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis data tentang peringkat 10 besar lembaga dengan kasus korupsi terbanyak, posisi tertinggi ditempati oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Sejalan dengan itu, pada tahun 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan daftar lembaga yang paling sering terlibat dalam tindak pidana korupsi, dan berdasarkan temuan mereka, mayoritas tindak pidana korupsi dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota. Ini menandakan bahwasanya pemerintah Kabupaten/Kota merupakan lembaga dengan indikasi terbanyak melakukan korupsi.

Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Timur, menghadapi tantangan serupa. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan kerentanannya terhadap tindak pidana korupsi, sebagaimana terlihat dari penilaian integritas pada tahun 2021. Terdapat empat pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur yang mendapat skor mendekati ambang batas wajar nasional. Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapat skor tertinggi adalah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan skor 72,06 sedangkan batas wajar nasionalnya adalah 72,40. Ini menandakan bahwasanya Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki risiko tinggi dalam hal korupsi. Berbagai kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, seperti korupsi dalam proyek infrastruktur, dana pendidikan, dan pengelolaan keuangan daerah, mencerminkan kompleksitas dan dampak negatif terhadap hubungan antara pemerintah dan masyarakat setempat.

Berbagai dinamika tersebutlah yang menjadi landasan fundamental dilakukannya penelitian ini. Penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut "Pengaruh Korupsi Terhadap Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara". Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah korupsi berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat pada pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Metode

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 738.189 Jiwa (BPS-*Statistics of Kutai Kartanegara Regency*, 2023). Sampel pada penelitian ini diambil menggunakan metode probability sampling dengan menggunakan teknik *cluster random* sampling. Banyaknya sampel pada penelitian ini adalah 100 responden yang didapatkan dengan rumus *slovin*. Jenis data pada penelitian ini menggunakan data primer yang didapat dari hasil penyebaran kuesioner melalui *google form*, jawaban responden diproses menggunakan skala *likert* dengan ketentuan skala 1 hingga 4. Teknik analisis data yang dipakai adalah analisis regresi sederhana dengan bantuan program IBM SPSS *Statistics versi 22 for windows*.

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara tingkat korupsi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil

penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana korupsi mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap integritas dan kredibilitas lembaga pemerintah.

Berdasarkan hasil uji analisis regresi sederhana, persamaan regresi yang terbentuk adalah $Y = 12,519 + 0,758X$. Nilai konstanta sebesar 12,519 menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat akan berada pada tingkat 12,519 jika korupsi (X) sama dengan nol, mengindikasikan *baseline* kepercayaan masyarakat tanpa korupsi. Koefisien regresi sebesar 0,758 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam variabel korupsi (X) akan meningkatkan kepercayaan masyarakat (Y) sebesar 0,758 unit. Nilai signifikansi untuk konstanta dan koefisien regresi adalah 0,000, yang lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel korupsi (X) berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat (Y). Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat korupsi, semakin rendah kepercayaan masyarakat pada pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat korupsi yang tinggi dengan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini konsisten dengan hipotesis bahwa korupsi akan berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Demikian dengan uji Koefisien Determinasi (R^2), diketahui bahwa nilai R^2 yang diperoleh adalah 0.311 atau 31.1%. Nilai ini mengindikasikan bahwa variabel korupsi (X) mampu menjelaskan variasi variabel kepercayaan masyarakat (Y) sebesar 31.1%. Sisanya, sebesar 68.9% kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dipengaruhi oleh variabel – variabel lain yang tidak diteliti. Dengan demikian, hasil uji F dan koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel korupsi secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel kepercayaan masyarakat. Meskipun variabel korupsi mampu menjelaskan sekitar 31% variasi dalam kepercayaan masyarakat, namun juga terdapat variabel – variabel lain di luar penelitian yang juga berkontribusi dan dapat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat pada pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut.

Mengungkap Kepercayaan Masyarakat pada Praktik Korupsi: Penyalahgunaan Kekuasaan, Dana Publik, Pengkhianatan Kepercayaan, dan Eksploitasi Keuntungan Pribadi

Tabel 1. Tanggapan Responden atas Indikator Variabel Korupsi (X)

| Indikator | No Item | Tanggapan Responden | | | | Total | Skor Nilai | | | | Total | Indeks |
|----------------------------|---------|---------------------|----|----|-----|-------|------------|-----|----|---|-------|--------|
| | | SS | S | TS | STS | | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
| Penyalahgunaan Kekuasaan | 1 | 73 | 26 | 0 | 0 | 100 | 292 | 78 | 0 | 0 | 370 | 93% |
| | 7 | 79 | 21 | 0 | 0 | 100 | 220 | 126 | 4 | 0 | 350 | 95% |
| Penyalahgunaan Dana Publik | 3 | 70 | 27 | 1 | 1 | 100 | 280 | 81 | 2 | 1 | 364 | 91% |
| | 4 | 69 | 29 | 1 | 1 | 100 | 276 | 87 | 2 | 1 | 366 | 92% |
| Pengkhianatan Kepercayaan | 5 | 72 | 27 | 0 | 0 | 100 | 288 | 81 | 0 | 0 | 369 | 92% |
| | 6 | 45 | 43 | 9 | 3 | 100 | 180 | 129 | 18 | 3 | 330 | 83% |
| Keuntungan Pribadi | 2 | 55 | 42 | 2 | 0 | 100 | 316 | 63 | 0 | 0 | 379 | 88% |
| | 8 | 56 | 37 | 6 | 0 | 100 | 224 | 111 | 0 | 0 | 347 | 87% |

Sumber : Data Diolah Peneliti (2023)

Berdasarkan hasil survei di Kabupaten Kutai Kartanegara, masyarakat memiliki persepsi yang kuat terhadap berbagai bentuk korupsi yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan dana publik, pengkhianatan kepercayaan, dan keuntungan pribadi oleh pejabat pemerintah. Mayoritas responden setuju bahwa nepotisme, suap-menyuap, dan monopoli kekuasaan merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan, menunjukkan kesadaran dan penentangan terhadap tindakan yang merugikan integritas pemerintahan. Dalam hal penyalahgunaan dana publik, responden setuju bahwa tindakan tersebut adalah bentuk korupsi yang berdampak negatif pada efisiensi alokasi dana, pembangunan lokal, dan kualitas layanan publik dengan tingkat persetujuan sebesar 91% dan 92%. Persepsi masyarakat terhadap pengkhianatan kepercayaan juga tinggi, dengan 92% dan 83% responden setuju bahwa korupsi mencerminkan pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan kepada pemerintah, menegaskan bahwa korupsi tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengurangi kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam proses demokratis. Terakhir, terkait keuntungan pribadi, 88% dan 87% responden setuju bahwa korupsi yang dilakukan untuk meraih keuntungan pribadi merugikan masyarakat, menunjukkan pemahaman masyarakat terhadap dampak negatif korupsi pada kualitas pembangunan dan layanan publik. Secara keseluruhan, konsepsi masyarakat atas indikator-indikator ini mencerminkan kesadaran dan ketidakpuasan terhadap praktik korupsi yang merugikan kesejahteraan dan kepercayaan publik.

Korupsi dan Dampaknya Terhadap Integritas, Kompetensi, Konsistensi, Loyalitas dan Transparansi Pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara: Bagaimana Kepercayaan Masyarakat Dipengaruhi?

Tabel 2. Tanggapan Responden atas Indikator Variabel Korupsi (X)

| Indikator | No Item | Tanggapan Responden | | | | Total | Skor Nilai | | | | Total | Indek |
|--------------|---------|---------------------|----|----|-----|-------|------------|-----|----|---|-------|-------|
| | | SS | S | TS | STS | | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
| Integritas | 9 | 85 | 15 | 0 | 0 | 100 | 292 | 78 | 0 | 0 | 370 | 93% |
| | 10 | 60 | 40 | 0 | 0 | 100 | 220 | 126 | 4 | 0 | 350 | 88% |
| Kompetensi | 11 | 51 | 41 | 8 | 1 | 100 | 204 | 123 | 16 | 0 | 343 | 86% |
| | 12 | 50 | 46 | 4 | 1 | 100 | 200 | 138 | 8 | 0 | 346 | 87% |
| Konsistensi | 13 | 55 | 43 | 2 | 0 | 100 | 220 | 129 | 4 | 0 | 353 | 88% |
| | 14 | 29 | 52 | 15 | 4 | 100 | 116 | 156 | 30 | 4 | 306 | 77% |
| Loyalitas | 15 | 62 | 36 | 2 | 0 | 100 | 248 | 108 | 4 | 0 | 360 | 90% |
| | 16 | 50 | 48 | 2 | 0 | 100 | 200 | 144 | 4 | 0 | 348 | 87% |
| Transparansi | 17 | 58 | 42 | 0 | 0 | 100 | 292 | 78 | 0 | 0 | 370 | 93% |
| | 18 | 30 | 32 | 29 | 8 | 100 | 220 | 126 | 4 | 8 | 358 | 90% |

Sumber : Data Diolah Peneliti (2023)

Dalam konteks Kabupaten Kutai Kartanegara, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor terkait praktik korupsi. Mayoritas responden memiliki persepsi yang kuat terhadap pentingnya integritas, kompetensi, konsistensi, integritas dianggap sebagai fondasi utama dalam mempertahankan kepercayaan, dengan kejujuran yang konsisten dalam pemerintahan dianggap sangat penting oleh 93% dan 88% responden. Praktik korupsi yang merajalela dapat merusak integritas ini, menyebabkan ketidakpercayaan dan ketidakstabilan dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Selain itu, korupsi dipercaya dapat memberikan dampak dan pengaruh pada kompetensi pemerintah dalam menyediakan layanan publik. Korupsi dapat menghambat kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan yang berkualitas, seperti yang dikhawatirkan oleh 86% dan 87% responden. Ini mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien.

Konsistensi kebijakan pemerintah adalah faktor lain yang memengaruhi kepercayaan. Meskipun mayoritas responden percaya pada konsistensi kebijakan pemerintah (88%), terdapat kekhawatiran serius terhadap konsistensi dalam komunikasi dan tindakan terkait penanganan korupsi (77%). Ketidakkonsistenan dalam penanganan korupsi dapat memperkuat persepsi negatif terhadap kebijakan pemerintah dan merusak kepercayaan masyarakat.

Loyalitas pemerintah terhadap kepentingan publik juga dapat terkikis akibat korupsi. Sebanyak 90% dan 87% responden menganggap bahwa praktik korupsi mengurangi loyalitas pemerintah terhadap kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dampak ini mempengaruhi dukungan dan kepercayaan warga terhadap pemerintah, mengurangi keterlibatan dalam proses pemerintahan dan partisipasi dalam pembangunan lokal.

Terakhir, transparansi. Hasil jawaban responden atas indikator transparansi pada item 17 mencapai indeks 93%, masyarakat percaya bahwa tindakan korupsi dapat mengurangi tingkat transparansi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Disisi lain, pada item 18 dengan indeks 90% menegaskan bahwa informasi mengenai anggaran dan pengeluaran publik di Kabupaten Kutai Kartanegara dipandang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat. Maka, dapat disimpulkan bahwa meskipun masyarakat percaya bahwa tindakan korupsi dapat mengurangi transparansi pemerintah, masyarakat juga percaya dengan kemudahan akses informasi mengenai anggaran dan pengeluaran publik di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini menunjukkan bahwa adanya upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjaga transparansi mengenai anggaran dan pengeluaran dana publik, karena mengingat transparansi adalah suatu hal yang penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Relevansi Pengaruh Korupsi Terhadap Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara: Tinjauan Teori Syed Hussein Alatas

Penelitian ini mengungkapkan bahwa korupsi yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki dampak yang terhadap kepercayaan masyarakat. Berdasarkan teori utama Syed Husein Alatas, yang mendefinisikan korupsi sebagai "penyalahgunaan kepercayaan untuk keuntungan pribadi", ditemukan bahwa praktik korupsi seperti nepotisme, suap-menyuap, dan penyalahgunaan dana publik secara konsisten merusak integritas dan moralitas pemerintah di mata masyarakat.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, semakin rendah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hasil survei menunjukkan tingkat persetujuan yang tinggi bahwa penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi perizinan, dan korupsi terkait keuntungan pribadi secara langsung mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap integritas dan tujuan utama

pemerintah. Selain itu, korupsi yang melibatkan penyalahgunaan dana publik juga dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat.

Hasil penelitian menyoroiti bahwa ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana publik tidak hanya mengurangi efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dalam konteks teori Alatas, konsep pengkhianatan kepercayaan menunjukkan bahwa praktik korupsi dapat mengancam legitimasi pemerintah dan mempengaruhi dukungan masyarakat terhadap kebijakan publik.

Temuan ini menguatkan relevansi teori Alatas dalam menjelaskan bahwa korupsi tidak hanya memiliki dampak ekonomi, tetapi juga mengancam integritas dan moralitas pemerintahan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyediakan landasan yang kuat untuk memahami hubungan antara korupsi dan kepercayaan masyarakat dalam konteks Kabupaten Kutai Kartanegara. Temuan-temuan ini memberikan perspektif yang mendalam tentang bagaimana korupsi mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap integritas, kompetensi, konsistensi, loyalitas, dan transparansi pemerintahan, serta mendukung teori Syed Husein Alatas sebagai kerangka analisis yang relevan dalam konteks ini.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bahwa korupsi memiliki pengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Penolakan terhadap hipotesis nol (H_0) didukung oleh temuan analisis data yang mengkonfirmasi hubungan ini. Dari hasil analisis regresi sederhana, ditemukan persamaan regresi $Y = 12,519 + 0,758X$. Hasil ini konsisten dengan temuan penelitian sebelumnya yang juga menunjukkan dampak negatif korupsi terhadap kepercayaan masyarakat. Respons pada variabel korupsi menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan pada Item 7 mencatatkan persentase tertinggi dengan indeks 95%, menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi terhadap dampak negatif dari praktik seperti nepotisme, suap-menyuap, dan monopoli kekuasaan. Sebaliknya, persentase terendah terdapat pada Item 6 dengan indeks 83%, menandakan bahwa kasus korupsi yang melibatkan pemerintah di Kabupaten Kutai Kartanegara berdampak pada partisipasi dalam proses demokrasi dan kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah. Respons pada variabel kepercayaan masyarakat menunjukkan bahwa integritas mendapat indeks tertinggi sebesar 93%, menegaskan pentingnya integritas dalam pemerintahan untuk mempertahankan kepercayaan publik. Di sisi lain, indeks terendah sebesar 77% pada Item 14 menunjukkan kekhawatiran masyarakat terhadap konsistensi pemerintah dalam menjaga respons terhadap isu korupsi. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, terdapat keterbatasan yang signifikan terkait rendahnya tingkat partisipasi masyarakat usia 40 tahun ke atas dalam survei daring yang dilakukan. Hal ini dapat memengaruhi representasi yang akurat dari seluruh spektrum masyarakat dalam penelitian ini. Meskipun demikian, hasil penelitian ini tetap memberikan wawasan yang berharga terkait hubungan antara tingkat korupsi dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil analisis menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat, sesuai dengan temuan sebelumnya yang mendukung hubungan tersebut.

Acknowledgment

Terima kasih kami ucapkan kepada Universitas Mulawarman yang telah mendukung kami dalam penyelesaian artikel ini.

References

- Alatas, S. H. (1983). *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial: Jakarta.
- Alatas, S. H. (1987). *Korupsi (Sifat, Sebab, dan Fungsi)*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Statistika, B. P. (2023). *Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Angka 2023*. Kutai Kartanegara: BPS Kab. Kutai Kartanegara.
- Dwiyanto, Agus. (2011). *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Evi Maria, A. H. (2021). Public Governance dan Korupsi: Bukti Pengujian dari Indonesia Menggunakan Perspektif Teori Keagenan. *Jurnal Akuntansi*, 11(3), 223–234.
- Kalalinggi, R. (2020). Demoralization of Government Bureaucratic Corruption in East Kutai District Head Ismunandar. *Journal of Governance and Public Policy*, 7(3), 203–213. <https://doi.org/10.18196/jgpp.73134>
- Kapita Selekt dan Beban Biaya Sosial Korupsi. (2015). *Kapita Selekt dan Beban Biaya Sosial Korupsi*. In *Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi*.
- Korupsi, K. P. (2020). Modul Materi TINDAK PIDANA KORUPSI. In 2016. <https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/buku/modul-materi-tindak-pidana-korupsi>
- Machali, I. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif. In *Laboratorium Penelitian dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur*.
- Muhammad Syihabuddin Qosthalani. (2020). Pengaruh Persepsi Korupsi Terhadap Kepercayaan Masyarakat Kota Malang Pada Anggota Dprd. *Introduction to Survey Sampling*. https://www.researchgate.net/publication/347521359_pengaruh_persepsi_korupsi_terhadap_kepercayaan_masyarakat_kota_malang_paa_anggota_dprd
- Pujiyono. (2017). Istilah, Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi. *Tindak Pidana Korupsi*, 1–22.
- Robbins, Stephen P., dan Judge, T. A. (2023). Organizational Behavior. In *Organizational Behavior*. <https://doi.org/10.4324/9780203385418>
- Sudarmono. (2021). *Pembangunan Modal Sosial*. Buku Literatur IPDN.
- Richey, S. (2009). The impact of corruption on social trust. *American Politics Research*, 38(4), 676–690. <https://doi.org/10.1177/1532673X09341531>
- Robbins, Stephen. 2006. *Perilaku Organisasi*. Edisi 10. Indeks Gramedia: Klaten
- Robbins, Stephen P., dan Judge, T. A. (2023). *Organizational Behavior Nineteenth Edition*. Pearson Education: United Kingdom
- Sudarmono. (2021). *Pembangunan Modal Sosial*. Rtujuh Media Printing: Bandung
- Widiastuti, T. W. (2009). Korupsi Dan Upaya Pemberantasannya. *Wacana Hukum*, VIII(2), 107–118
- Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Dokumen Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Jumlah Penduduk (Jiwa) pada Tahun 2020